

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1. Kajian Empirik

Penelitian mengenai Politik Identitas Etnis dalam Pemilihan Walikota Kupang Periode 2017 – 2022 (Studi Kasus di Kelurahan Penfui, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang) ini, mengacu pada beberapa referensi seperti buku serta hasil penelitian lain yang berasal dari skripsi yang menjadi referensi untuk membantu memberikan informasi pada penelitian ini. Berikut beberapa referensi tentang politik identitas dalam pilkada yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu, antara lain;

- a) Irfan Zharfandy (2016) dengan judul skripsi tentang *Pengaruh Politik Identitas terhadap Pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2013*. Fokus dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh politik identitas yang terdapat pada Pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan pada tahun 2013 dan untuk mengetahui faktor-faktor yang membuat politik identitas muncul pada pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, Irfan menyimpulkan bahwa terdapat tiga faktor yang melatar belakangi politik identitas masih berpengaruh pada pemilihan gubernur Sulawesi Selatan tahun 2013 yaitu masyarakat hierarkis (*patron-klien*), polarisasi politik oleh elit lokal dan regulasi pemerintah (*kebijakan desentralisasi dan pemilihan umum*).

Peta geopolitik selatan (Makasar) versus utara (Bugis) mencerminkan kecenderungan seseorang yang masih melihat latar belakang etnis dan wilayah pasangan calon gubernur masih tetap ada, bahkan memunculkan persaingan berdasarkan kewilayahan yang didasarkan atas apa yang telah terjadi pada masa kerajaan tradisional dengan perebutan kekuasaan antara Kerajaan Bone dan Kesultanan Gowa. Namun politik identitas memang menjadi salah satu aspek yang diperhitungkan dengan implikasinya adalah keberpihakan masyarakat etnis kepada pasangan calon yang berasal dari identitas etnis yang sama.

Perbedaan antara peneliti terdahulu Irfan Zharfandy dengan peneliti yaitu bahwa peneliti terdahulu lebih melihat pengaruh politik identitas dari segi etnis dan kewilayahan tertentu yang berpengaruh dalam menentukan jumlah pemilih dan perolehan suara. Hal ini sangat berbeda dengan peneliti, dimana peneliti lebih memfokuskan pada politik identitas etnis dalam pemilihan Wali Kota Kupang periode 2017 – 2022 dengan lokus di Kelurahan Penfui, Kecamatan Maulafa. Akan tetapi adapun kesamaan antara peneliti terdahulu dengan peneliti antara lain sama-sama membahas mengenai politik identitas dalam pemilihan kepala daerah.

- b) Ananias Riyoan Philip Jacob (2017) dengan judul skripsinya tentang *Preferensi Masyarakat Etnis Timor dalam Pemilihan Legislatif Tahun 2014 di Kota Kupang*. Fokus dari penelitian ini adalah untuk

mengetahui bagaimanakah perilaku memilih masyarakat etnis Timor dan faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku pemilih dalam pemilu legislatif tahun 2014. Berdasarkan hasil penelitian ini, Jacob menyimpulkan bahwa perilaku memilih dalam masyarakat etnis Timor di Kota Kupang tidak didorong oleh sentimen keetnisan, akan tetapi faktor identifikasi partai sangat mempengaruhi pemilih dari masyarakat entis Timor.

Perbedaan antara peneliti terdahulu Anasias Riyoan Philip Jacob dengan peneliti antara lain bahwa peneliti terdahulu lebih memfokuskan pada pengaruh atau hubungan antara sentimen etnis dengan preferensi memilih hanya pada masyarakat etnis Timor terhadap perilaku pemilih dalam pemilu legislatif. Berbeda dengan peneliti yang meneliti tentang pengaruh etnis yang ada di Kota Kupang terhadap pemilihan umum kepala daerah. Akan tetapi terdapat kesamaan antara peneliti terdahulu dengan peneliti yakni sama-sama mengkaji mengenai politik identitas etnis.

- c) Elisabeth Yoseva Lana dengan judul skripsi tentang *Politik Identitas dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah (Studi Deskriptif tentang Peran Orang Flores di Kota Kupang dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTT Tahun 2013)*. Fokus dari penelitian ini yaitu apa saja nilai dan ideologi orang Flores yang berpengaruh dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTT tahun 2013, peran orang Flores dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTT tahun 2013 serta

eksistensi ikatan primordialisme orang Flores pasca pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTT tahun 2013. Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa besarnya pengaruh orang Flores dalam kancah pemilu di NTT dan juga faktor etnis serta identitas lainnya yang menjadi pertimbangan utama masyarakat NTT dalam memilih pemimpin atau kepala daerah.

Perbedaan antara peneliti terdahulu Elisabeth Yoseva Lana dan peneliti antara lain bahwa peneliti terdahulu lebih memfokuskan pada salah satu etnis atau kelompok diaspora yakni orang Flores dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2013. Hal ini sangat berbeda dengan peneliti yang meneliti pengaruh identitas etnis yang ada di Kota Kupang terhadap pemilihan umum kepala daerah untuk semua etnis dengan lokus di Kelurahan Penfui, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang. Akan tetapi terdapat kemiripan antara peneliti terdahulu dengan peneliti yakni sama-sama mengkaji mengenai politik identitas etnis.

## **2.2.Landasan Teori**

### **2.2.1.Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA)**

Pemilihan kepala daerah (Pilkada) dapat dirumuskan sebagai mekanisme pendelegasian kedaulatan rakyat kepada peserta pemilu dan/atau calon anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah untuk membuat dan

melaksanakan keputusan politik sesuai dengan kehendak rakyat (Ramlan Surbakti, 2008).

Pilkada merupakan sebuah tonggak baru demokrasi dalam dinamika kehidupan berbangsa di Indonesia dimana demokrasi adalah kedaulatan berada di tangan rakyat yang dimanifestasikan melalui pemilihan umum (Pemilu) secara langsung oleh masyarakat dan diselenggarakan dengan jujur, adil dan aman.

Dalam pasal 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 menjelaskan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, selanjutnya disebut pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.

Berdasarkan beberapa defenisi tersebut diatas, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa pemilihan kepala daerah (Pilkada) merupakan proses demokrasi langsung dimana masyarakat memilih dan menyampaikan hak pilihnya terhadap pemimpin atau elit politik sesuai dengan prinsip penyelenggaraan pemilu.

### **2.2.2. Perilaku Pemilih**

Perilaku pemilih dalam pemilihan kepala daerah merupakan salah satu bentuk perilaku politik. Menurut Ramlan Surbakti (1992:19), perilaku politik merupakan kegiatan yang berkenaan dengan proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik. Sudijono Sastroatmodjo (1995:8) juga menyatakan bahwa perilaku politik merupakan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah ataupun masyarakat berkaitan dengan tujuan dari suatu masyarakat, kebijakan untuk mencapai suatu tujuan serta sistem kekuasaan yang memungkinkan adanya suatu otoritas untuk mengatur kehidupan masyarakat kearah pencapaian tujuan tersebut. Dengan demikian, perilaku politik merupakan tindakan masyarakat atau pemerintah yang berkaitan dengan kepentingan atau pencapaian tujuan terkait keputusan politik baik dalam proses pembuatan maupun pelaksanaannya.

Menurut A. A. Oka Mahendra (2005:75), perilaku pemilih merupakan tindakan seseorang yang berpartisipasi dalam memilih calon pemimpin ataupun isu publik tertentu. Sedangkan menurut Ramlan Surbakti (1999:145), perilaku pemilih merupakan bagian dari perilaku politik yang menggambarkan keikutsertaan warga negara dalam pemilu yang juga menjadi serangkaian kegiatan membuat keputusan.

Berdasarkan pendapat para ahli diatas, maka dapat disimpulkan bahwa perilaku pemilih merupakan suatu tindakan seseorang maupun

kelompok yang berkaitan dengan kepentingan atau tujuan dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan.

### **2.2.3.Partisipasi Politik**

Partisipasi politik merupakan salah satu indikator dalam suatu lingkup negara yang menganut sistem demokrasi, dimana suatu negara dapat dikatakan sebagai negara demokrasi apabila pemerintah yang berkuasa memberi kesempatan seluas-luasnya kepada warga negaranya untuk berpartisipasi dalam politik.

Menurut Herbert (*dalam* Miriam, 2008:183-184), partisipasi politik merupakan kegiatan-kegiatan sukarela (*Voluntary*) dari masyarakat dengan mengambil bagian dalam proses pemilihan umum dan secara langsung atau tidak langsung dalam proses pembuatan/pembentukan kebijakan umum. Kemudian, Miriam Budiarjo (2008:183) menyimpulkan bahwa partisipasi politik merupakan kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik. Begitupun Ramlan Surbakti (2006: 140:141) juga mendefinisikan partisipasi politik merupakan keikutsertaan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan menyangkut atau mempengaruhi hidupnya.

Berdasarkan definisi menurut para ahli diatas, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa partisipasi politik merupakan keikutsertaan seseorang atau sekelompok orang dalam kehidupan politik baik dari bentuk sosial maupun keterkaitan sosialnya.

#### **2.2.4. Politik Identitas Etnis**

Secara etimologis, kata etnis berasal dari bahasa Yunani “*Ethnos*” yang berarti setiap kelompok sosial/etnis yang ditentukan oleh ras, adat istiadat, bahasa, nilai dan norma budaya. Koentjaraningrat (*dalam* Liliweri, 2005:46) mengungkapkan etnik sebagai kelompok sosial atau kesatuan hidup manusia yang mempunyai sistem interaksi dan sistem norma yang mengatur interaksi tersebut. Adanya komunitas dan rasa identitas yang mempersatukan semua anggotanya serta memiliki sistem kepemimpinannya sendiri.

Clifford Geertz (*dalam* Hussin Mutalib, 1995:39) mengungkapkan bahwa etnis menjadi suatu karakter, kualitas atau kondisi yang dimiliki oleh suatu kelompok etnis, ataupun kelompok etnis itu sendiri. Geertz mengidentifikasi berbagai karakteristik askriptif di sekitar kelompok etnis yaitu, ikatan darah, ras, pola-pola dominasi, bahasa, agama, adat istiadat, geografi dan sejarah.

Menurut Kellas (1998), politik identitas etnis mengacu pada politik kelompok etnis atau minoritas etnis yang tidak memiliki teritori sendiri yang tujuannya untuk pencarian proteksi dan kemajuan bagi kelompoknya serta kebebasan berekspresi dan bersosialisasi, dimana kelompok minoritas menjadi subkoordinat kelompok mayoritas yang mendominasi sosialitas hubungan, maka minoritas inilah yang menjadi etnis, menjadi unik atau bahkan terasing dan aneh. Gerakan politik etnis pada awalnya berorientasi untuk mendapatkan kekuasaan, penguasaan



wilayah, penguasaan sumber-sumber ekonomi bahkan penguasaan manusianya (etnis lain). Selanjutnya pada era politik modern sekarang politik etnis mengikuti perkembangannya sehingga muatan-muatan ideologis muncul. Kesadaran etnis kemudian menjadi besar dan menjelma menjadi suatu kesadaran suku dan wilayah yang lebih luas mengarah kepada bangsa.

Agnes Heller (*dalam* Ubed Abdilah, 2002:16) yang mendefinisikan politik identitas sebagai gerakan politik yang fokus perhatannya adalah perbedaan sebagai suatu kategori politik yang utama. Karena ide perbedaan telah menjanjikan suatu kebebasan (*freedom*), toleransi dan kebebasan bermain (*free play*), meskipun dibalik itu bahaya munculnya pola-pola intoleransi, kekerasan dan pertentangan etnis. Sedangkan menurut Donald L. Morowitz (1998), pakar politik dari Universitas Duke mendefinisikan politik identitas adalah memberikan garis yang tegas untuk menentukan siapa yang akan disertakan dan siapa yang akan ditolak. Karena garis-garis penentuan tersebut tampak tidak dapat dirubah, maka status sebagai anggota bukan anggota dengan serta merta tampak bersifat permanen.

Berdasarkan beberapa definisi tersebut diatas, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa politik identitas etnis akan menjadi sebuah masalah apabila diangkat dalam isu-isu pemilu. Etnis sebagai instrumen politik dapat menjadi alat untuk memobilisasi massa dan mendorong terjadinya fragmentasi di masyarakat. Namun apabila dilihat dari segi

strategi politik, tiap partai atau kandidat yang berkontestasi dalam pemilihan tersebut akan menjadikan politik identitas etnis sebagai alat dalam mengakomodasi apa yang menjadi orientasi pemilih dalam memilih.

Realitas ini saling berkaitan dengan mempertahankan ikatan primordial di komunitas etnis dan politisasi etnis dalam masalah kenegaraan melalui penekanan, ideologisasi, persatuan dan modifikasi warisan-warisan budaya kelompok etnis yang khas dan unik.

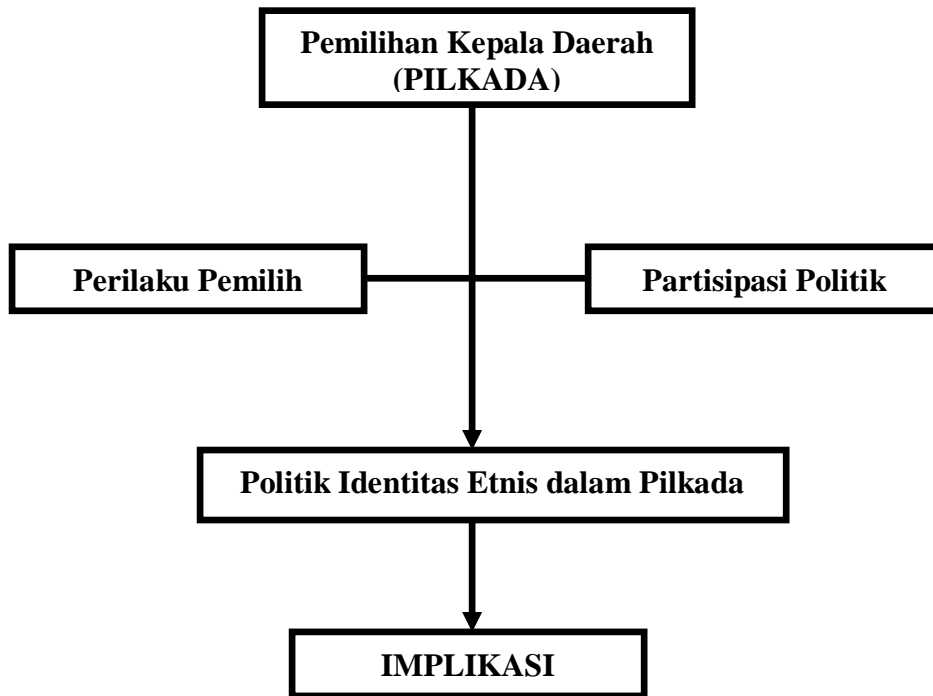
### **2.3. Alur Pikir**

Pemilihan kepala daerah merupakan kontestasi politik yang paling strategis untuk memilih kepala daerah yang berkualitas. Tingkat keberhasilan dalam pilkada tidak hanya diukur melalui proses penyelenggaraannya yang lancar dan damai, akan tetapi manfaat dan hasil yang diperoleh. Apabila pemilihan kepala daerah hanya digunakan sebagai ajang perebutan kekuasaan dari suara pemilih, maka dikhawatirkan akan menghasilkan pemimpin yang hanya populer dan diterima secara luas namun tidak memiliki kompetensi dalam mengelola daerah.

Kehadiran politik identitas etnis dalam pilkada sangat berpengaruh penting. Secara tidak langsung pemilihan kepala daerah menempatkan politik identitas etnis menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi pilihan politik seseorang. Hal ini dilandasi oleh kecenderungan masyarakat Kelurahan Penfui, Kecamatan Maulafa dalam memilih calon Wali Kota

Kupang periode 2017 – 2022 berdasarkan pengaruh keetnisan yang dapat digambarkan dalam bagan berikut ini :

**Gambar 1. Bagan Kerangka Berpikir**



#### **2.4. Defenisi Konseptual**

Definisi konseptual merupakan definisi yang berisi istilah-istilah yang berangkat dari konsep yang digunakan untuk menjelaskan atau mendeskripsikan kerangka pikir yang dibangun. Beberapa definisi konseptual yang digunakan peneliti antara lain:

- a) Pilkada merupakan pemilihan kepala daerah secara langsung oleh masyarakat daerah tersebut untuk memilih kepala daerahnya yang baru serta para wakilnya secara langsung oleh rakyat yang berasaskan pada langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

- b) Partisipasi Politik dalam penelitian ini adalah keikutsertaan warga negara biasa untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah dengan menjadi partisipan dalam pemilihan umum, partisipasi dalam diskusi politik informal, partisipasi dalam rapat umum, mengikuti kampanye serta menjadi anggota pasif suatu organisasi politik.
- c) Perilaku Pemilih merupakan tindakan seseorang atau kelompok dalam memilih dan menentukan calon pemimpinnya.